

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana.
- Banurusman. 1995. *Polisi Masyarakat dan Negara*. Yogyakarta: Biagraf Publishing.
- I Made Untung Sunantara, et al. 2021. *Fungsi Sosial Kepolisian Republik Indonesia*. Gowa: Pusaka Almaida.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Ahsan Yunus ed)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2012. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*. Bandung: Nuansa.
- Lutfi Efendi. 2004. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Malang: Bayumedia Sakti.
- Mahmud Mulyadi. 2009. *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU Press.
- Marbun dan Mahfud. 1987. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Mirriam Budiardjo. 2013. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka. 2013.
- Nomensen Sinamo. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Philippus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Prajudi Atmosudirdjo. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabian Utsman. 2009. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Safri Nugraha, et al. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.



Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Warsito Hadi Utomo. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

Chris Januardi. 2023. *Pengaturan Kewenangan Kepala Desa dalam Mencegah Konflik Pertanahan Ditinjau Asas Kepastian Hukum*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Edy Basuki. 2022. *Implikasi Hukum Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Jonathan Hasudungan Hutagalung. 2019. *Peran Kepolisian dalam Penegakan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba terhadap Pengguna (di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Medan)*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

Pandu Dewo Saputro. 2017. *Kewenangan Kepolisian Sektor dalam Pemberian Izin Keramaian sebagai Bentuk Pengendalian Keamanan dan Ketertiban di Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya:

Akhmad Zaki Yamani. 2024. *The Technical Preparation of Legislation in The Legal System of Indonesia*. Jurnal Hukum Sehasen. Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu. Volume 10 Nomor 1. Halaman: 39-46.

Anggi Aulina. 2019. *Potensi Pengendalian Sosial Kejahatan: Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja dan Kualitas Pelayanan Kepolisian*. Deviance: Jurnal Kriminologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Volume 3 Nomor 1. Halaman: 1-23.

David Rhomadani dan Otto Yudianto. 2023. *Kewenangan Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Suap dan Gratifikasi yang Dilakukan oleh Oknum Kejaksaan: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*. YUSTISI. Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun. Volume 10 Nomor 2. Halaman: 67-75.

I Nyoman Suryana. 2022. *Kewenangan Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa Anarkis di Wilayah Hukum Polda Bali*. Jurnal Ilmiah Paad Kertha. Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta. Volume Nomor 1. Halaman: 42-52.



Ali dan Irnawati Tahir. 2021. *Implementasi Kebijakan Izin Keramaian dalam Upaya Penertiban Kegiatan Masyarakat diolsek Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru*. Meraja journal.

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. STIA Al Gazali. Volume 4 Nomor 2. Halaman: 73-89.

Mochamad Arifin dan Mochamad Mansur. 2023. *Kedudukan dan Fungsi Sat Intel Polsek Tlogosari dalam Menciptakan Harkamtibmas (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Bondowoso)*. JUSTITIABLE-Jurnal Hukum. Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro. Volume 5 Nomor 2. Halaman: 87-102.

Sri Wahyuni Laia dan Sodialman Daliwu. 2022. *Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang yang Bersifat Demokratis di Indonesia*, Jurnal Education and Development. Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Volume 10 Nomor 1. Halaman: 546-552.

Sofwan, et al. 2022. *Pentingnya Naskah Akademik dalam Penyusunan Peraturan Daerah*, Jurnal Diskresi. Fakultas Hukum Universitas Mataram. Volume 1 Nomor 1. Halaman: 17-27.

Wiwik Utami. 2020. *Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial dalam Masyarakat Ditinjau dari Segi Sosiologi Hukum*. Jurnal Maksiagama. Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang. Volume 12 Nomor 2. Halaman: 97-104.

Zulkifli Aspan, et al. 2019. *Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir sebagai Kewenangan yang Diderivasi dari Hak Menguasai Negara*. Al-Azhar Islamic Law Review. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa. Volume 1 Nomor 1. Halaman: 9-25.

Peraturan Perundang-undangan:

Petunjuk Lapangan Kapolri Nomor Pol/02/XII/1995 tentang Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.

Petunjuk Lapangan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Pol/02/XII/95 tentang Perjanjian dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.

Petunjuk Pelaksanaan Kapolri Nomor Pol/29/VII/1991 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Non-Organik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 510 tentang Keramaian Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara publik Indonesia.



Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Internet:

- Dewi Agustina. 2021. *Kapolrestabes Makassar: Tidak Ada Izin Keramaian Jelang Natal dan Tahun Baru 2021*. URL: <https://www.tribunnews.com/regional/2020/12/10/kapolrestabes-makassar-tidak-ada-izin-keramaian-jelang-natal-dan-tahun-baru-2021>. Diakses pada tanggal 16 November 2023.
- Mohamad Jamaludin. 2023. *10 Kota dengan Tingkat Kriminalitas Tertinggi di Indonesia: Waspada! Kejahatan di Kota-kota Besar*. URL: https://bangkalan.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-2746683166/10-kota-dengan-tingkat-kriminalitas-tertinggi-di-indonesia-waspada-kejahatan-di-kota-kota-besar#google_vignette. Diakses pada tanggal 16 November 2023.
- Muhamad Nursam. 2021. *Demonstrasi Pekerja THM di Makassar Tak Kantongi Izin Keramaian*. URL: <https://www.fajar.co.id/2021/02/12/demonstrasi-pekerja-thm-di-makassar-tak-kantongi-izin-keramaian/>. Diakses pada tanggal 16 November 2023.
- Polri.go.id. 2023. *Visi dan Misi Polri*. URL: <https://polri.go.id/visimisi>. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2023.
- Willa Wahyuni. 2022. *Tata Cara dan Syarat Izin Keramaian*. URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/tata-cara-dan-syarat-izin-keramaian-lt63622c62c004f/>. Diakses pada Tanggal 20 Oktober 2023.




LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh Surat Izin Keramaian

KEMENTERIAN
KORPRIKAM
KORPRIKAM

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PELABUHAN MAKASSAR
Jalan Ujung Pandang 12 Makassar 90111



SURAT IZIN
Nomor : SI / 08 / V / 2024

Pertimbangan : 1. bahwa telah dipenuhinya segala hal yang merupakan persyaratan formal dalam Permohonan Izin Kegiatan yang diajukan oleh pihak Pemohon ;
2. bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan dipandang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat pada umumnya, serta kebijaksanaan Pemerintah Daerah khususnya ditempat kegiatan dilaksanakan ;
3. bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan itu dimungkinkan untuk tidak menimbulkan kerawanan Kamtibmas, terutama dalam lingkungan dimana kegiatan dilaksanakan.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Surat Permohonan Izin dari Panitia Pelaksana Tim Produksi Pentas Drama Bahasa dan Sastra Indonesia Nomor : 027/ANM/IZK/JBSI-FBS-UNM/V/2024, tanggal 30 Mei 2024 Perihal Permohonan Izin Keramaian.
3. Surat Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Pemprov Sulsel Nomor: 177/UPT-MS/Budpar/V/2024 Tentang Tim Produksi Pentas Drama Bahasa dan Sastra Indonesia.
4. Surat Rekomendasi Polsek Wajo Nomor : B/Rek-07/V/2024/Unit Intelkam Tentang Izin Kegiatan Teater Pendidikan Sendratasik Angkatan 2024.
5. Surat Pengantar Kelurahan Pattunuang Nomor : 005/80/KP/V/2024 Tentang Izin Kegiatan Teater Pendidikan Sendratasik Angkatan 2024.

Memperhatikan : Segala kebijaksanaan Pemerintah berhubung adanya ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kegiatan tersebut.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada : Nama Penyelenggara : RIDWAN,S.S.,M.A.
Nama Penanggung Jawab : MUH. ZALDY FITRAH
Pekerjaan : MAHASISWA
Alamat : JL. MALENGKERI RAYA PARANGTAMBUNG
MAKASSAR

Untuk : Melaksanakan kegiatan sebagai berikut
1) Bentuk / Macam : TEATER PENTAS SENI
2) Waktu : HARI JUMAT TGL 31 MEI 2024
PUKUL 20.00 S/D 23.00 WITA
3) Tempat : GEDUNG TERTUTUP KESENIAN SULSEL
(- 4) Dalam ...



-2-

- 4) Dalam Rangka : PENTAS DRAMA MAHASISWA BAHASA DAN SASTRA INDONESIA ANGGARAN 2022
- 5) Peserta : ± 150 ORANG

Dengan Catatan :

1. Penanggung Jawab wajib mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. wajib menjaga keamanan dan ketertiban didalam kegiatan yang dimaksud ;
 - b. wajib mencegah supaya para peserta tidak melakukan kegiatan-kegiatan lain yang bertentangan ataupun menyimpang dari pada tujuan kegiatan yang telah dinyatakan tertulis dalam pernyataan permohonan izin.
 - c. wajib melapor dalam waktu 3 X 24 Jam sebelum kegiatan dilaksanakan pada Polsek setempat.
 - d. wajib mentaati ketentuan-ketentuan lain yang diberikan oleh pejabat setempat sehubungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Bilamana terdapat penyimpangan dan / atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Izin ini, petugas Kepolisian/Keamanan dapat membubarkan/menghentikan atau mengambil tindakan lain berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku ;
3. Penyelenggara telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Surat Izin, namun situasi keamanan tidak kondusif, maka petugas Kepolisian dapat mencabut atau menghentikan dan mengambil tindakan lain berdasarkan ketentuan hukum ;
4. Surat Izin diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya kecuali dalam hal terdapat kekeliruan akan diadakan ralat seperlunya.
5. Setelah pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab agar melaporkan hasilnya kepada Kesatuan Polri yang mengeluarkan Izin, dalam waktu selambat-lambatnya satu minggu setelah selesainya kegiatan dimaksud.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : 31 Mei 2024

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN MAKASSAR
KEPALA SATUAN INTELKAM

Zulficar
ZULFICAR, S. Sos

INSPEKTUR POLISI SATU NRP 84060270

Tembusan :

1. Kabagops Polres Pelabuhan Makassar.
2. Kapolsek Wajo Polres Pelabuhan Makassar.
3. Kasat Lantas Polres Pelabuhan Makassar.
4. Kasat Sabhara Polres Pelabuhan Makassar.



Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PELABUHAN MAKASSAR

SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket / 85 / V / KEP / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SEMUEL TO'LONGAN, S.H., M.H., M.Si.
Pangkat / Nrp : KOMPOL / 75020275
Jabatan : KABAG SDM
Kesatuan : POLRES PELABUHAN MAKASSAR

Menerangkan :

N a m a : AMMAR ATHIEF
Nomor Pokok : B021201082
Program Studi : HUKUM / HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Bahwa benar yang bersangkutan adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah melaksanakan Penelitian pada Polres Pelabuhan Makassar guna penyelesaian penelitian yang bersangkutan dengan Judul "Kewenangan Kepolisian dalam Pemberian Surat Izin Keramaian di Wilayah Polres Pelabuhan Makassar", sesuai Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Nomor : 074/UN4.5.1/PT.00/2024 tanggal 03 Januari 2024 perihal permohonan izin penelitian. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan untuk dipergunakan semestinya.

Makassar, 15 Mei 2024
a.n KAPOLRES PELABUHAN MAKASSAR POLDA SULSEL
KABAG SDM

SEMUEL TO'LONGAN, S.H., M.H., M.Si.
KOMPOL POLRES PELABUHAN MAKASSAR NRP 75020275



